

BROADCAST

Bapas Nusakambangan Ikuti Diskusi Panel Indonesia Netherland Legal Update (INLU) Secara Virtual

yoan tanamal - CILACAP.BROADCAST.CO.ID

Sep 22, 2022 - 09:26



Bapas Nusakambangan Ikuti Diskusi Panel Indonesia Netherland Legal Update (INLU) Secara Virtual

Nusakambangan - Belajar dari kisah sukses Belanda Direktorat Jendral Pemasyarakatan melaksanakan Diskusi Panel dalam rangkaian INLU yang diselenggarakan dari tanggal 19 s/d 29 September 2022. Dalam hari ketiga

kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas mengenai "Value of Probation Service" dan sesi kedua membahas mengenai "Probation Service and Prosecution Client/ Contractor or Equals", Kamis(22/09/2022).

Perwakilan Indonesia selain jajaran Kemenkumham, turut serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, hingga Kementerian Sosial. Sementara delegasi Belanda terdiri dari Reclustering Netherland, Center for International Legal Cooperation (CILC), Saxion University of Applied Sciences, Restorative Justice Netherland, dan Openbaar Ministerie (prosecution).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono yang mewakili Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga memimpin secara langsung acara tersebut.

"Indonesia tengah melakukan akselerasi penerapan keadilan restorative dalam penegakan hukum pada fase praajudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Menurutnya, filosofi keadilan restorative telah ada dalam jati diri masyarakat Indonesia melalui semangat kekeluargaan, gotong royong, serta kearifan local, dan adat istiadat. Penerapan keadilan restorative untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman bukan semata-mata untuk menghentikan perkara, namun juga untuk mencapai pemulihan antara pelaku pidana, korban, keluarga, dan masyarakat." ungkap Reynhard.

Ia berharap melalui diskusi panel ini, dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum di kedua negara. Khususnya bagi Indonesia dapat menjadi rekomendasi penerapan keadilan restorative dalam penyusunan KUHP dan KUHP baru serta meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum. /yoantanamal